

Implementation Of PSAP No. 11 In The Preparation Of Consolidated Financial Reports At The Secretariat Of The West Nias Regency DPRD

Penerapan PSAP No.11 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Sekeretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Mujur Kurniawati Daeli ¹⁾; Kurniawan Sarotonafu Zai ²⁾; Sophia Molinda Kakisina ³⁾
Fakta Solala Zebua ⁴⁾

^{1,2,3,4)}Study Program of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Nias

Email: ¹⁾ mujurkurniawati@gmail.com; ²⁾ kurniawans.zai@unias.ac.id; ³⁾ molindasophia@gmail.com
⁴⁾ faktasolala@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juli 2025]
Revised [25 Agustus 2025]
Accepted [27 Agustus 2025]

KEYWORDS

PSAP No.11, Consolidated Financial Statements, Accountability, DPRD Secretariat.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.11 telah berjalan cukup baik, terlihat dari tersusunnya laporan konsolidasian seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknis eliminasi transaksi antar unit dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi PSAP No.11 sudah mengarah pada standar yang berlaku, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi teknologi untuk mendukung pelaporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to examine the extent to which Government Accounting Standards Statement (PSAP) No.11 has been implemented in the preparation of consolidated financial statements at the Secretariat of the DPRD of Nias Barat Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of PSAP No.11 has been fairly well executed, as evidenced by the preparation of consolidated reports such as the Budget Realization Report (LRA), Statement of Changes in Budget Surplus (LPSAL), Balance Sheet, Operational Report (LO), Cash Flow Statement (LAK), and Statement of Changes in Equity (LPE) in accordance with the standards. However, there are still obstacles, including limited human resources in understanding the technical aspects of eliminating inter-unit transactions and the suboptimal use of information systems. This shows that although the implementation of PSAP No.11 is aligned with the applicable standards, it requires capacity building for human resources and optimization of technology to support more accurate, transparent, and accountable financial reporting.

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta realisasi anggaran dari setiap entitas pelaporan, baik entitas individual maupun entitas konsolidasian. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan berbagai standar dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaporan keuangan di seluruh entitas pemerintahan, salah satunya adalah melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. (Risal and Ilham n.d.)

Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan informasi mengenai kondisi keuangan dan posisi keuangan juga hasil operasi dari suatu induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan tunggal. (Taufiq Khaerudin 2023)

Kesulitan Eliminasi Transaksi Antar Unit Pada saat konsolidasi, transaksi antar bagian sering tercatat ganda sehingga menimbulkan laporan yang tidak akurat. Pengelolaan Data Keuangan yang Kurang Rapi Dokumen pendukung transaksi seperti SPJ, bukti belanja, atau laporan aset kadang tidak lengkap, sehingga memperlambat proses konsolidasi.

PSAP Nomor 11 memberikan pedoman teknis bagi entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, arus kas, serta aktivitas seluruh entitas pelaporan di bawah satu entitas induk sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan laporan keuangan konsolidasian menjadi penting karena mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan, termasuk oleh perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD.

Menurut (Kasmir, 2019) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. (Afiyah, Arsy, and Engkus 2021). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu entitas akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas legislatif, seperti penyusunan anggaran daerah, pengawasan, dan pembuatan peraturan daerah. Sebagai entitas yang mengelola anggaran cukup besar untuk mendukung operasional dan layanan kesekretariatan, Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menerapkan PSAP Nomor 11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini diperlukan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya, memudahkan analisis, dan menjadi dasar pengambilan keputusan baik oleh DPRD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan.

Penerapan PSAP Nomor 11 tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketidakkuratan atau ketidak lengkapan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik, kualitas pengawasan oleh DPRD, serta efektivitas pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan PSAP Nomor 11 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat dirumuskan upaya perbaikan ke depan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.11 belum sepenuhnya optimal di berbagai pemerintah daerah. Misalnya, penelitian oleh Sari (2018) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan, PSAP No.11. Penelitian oleh Simanjuntak dan Sihombing (2020) di Kota Medan juga menemukan adanya kelemahan dalam proses eliminasi transaksi antar entitas. Sementara itu, Lestari (2021) dalam penelitiannya di Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten menyatakan bahwa penerapan PSAP No.11 masih bersifat parsial akibat kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.11 masih menjadi tantangan tersendiri di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pada Sekretariat DPRD Nias Barat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Nias Barat, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP disusun agar laporan keuangan pemerintah daerah dihasilkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SAP memberikan landasan bagi penyusunan laporan keuangan, baik secara individual oleh masing-masing entitas pelaporan, maupun secara konsolidasian bagi entitas induk yang membawahi beberapa entitas anak. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar(Dedi Irawan Zebua et al. 2023)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Anon 2012). SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga PP Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basic) bisa dilakukan secara bertahap. (Rosana and Bharata 2023) Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP didasarkan pada keyakinan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk pengguna dan peninjau laporan keuangan publik, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Salah satu prinsip akuntansi menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan yang dihasilkan.

Fungsi Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)

Akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, untuk itu terdapat beberapa fungsi SAP, antara lain:

1. Menyediakan Pedoman Pengelolaan Keuangan
SAP memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Ini memastikan bahwa semua entitas pemerintah mengikuti prosedur yang seragam.
1. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas SAP berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana publik.
2. Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan
Dengan menerapkan SAP, informasi keuangan yang disajikan akan lebih konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
3. Memfasilitasi Pengawasan dan Audit
SAP mempermudah proses pengawasan dan audit karena adanya standar yang jelas dan terukur dalam pelaporan keuangan. Hal ini memudahkan auditor dalam menilai kepatuhan dan kinerja pengelolaan keuangan.
4. Mendukung Perencanaan dan Penganggaran
Dengan adanya standar yang jelas, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. SAP membantu dalam penyusunan anggaran yang realistis dan pengelolaan keuangan yang efisien.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP disusun agar laporan keuangan pemerintah daerah dihasilkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SAP memberikan landasan bagi penyusunan laporan keuangan, baik secara individual oleh masing-masing entitas pelaporan, maupun secara konsolidasian bagi entitas induk yang membawahi beberapa entitas anak. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar (Dedi Irawan Zebua et al. 2023)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Anon 2012). SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga PP Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (accrual basic) bisa dilakukan secara bertahap. (Rosana and Bharata 2023) Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP didasarkan pada keyakinan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada pemangku kepentingan, termasuk pengguna dan peninjau laporan keuangan publik, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Salah satu prinsip akuntansi menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan yang dihasilkan.

Fungsi Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)

Akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, untuk itu terdapat beberapa fungsi SAP, antara lain:

1. Menyediakan Pedoman Pengelolaan Keuangan
SAP memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang bagaimana transaksi keuangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit. Ini memastikan bahwa semua entitas pemerintah mengikuti prosedur yang seragam.
2. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas SAP berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana publik.
3. Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan
Dengan menerapkan SAP, informasi keuangan yang disajikan akan lebih konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Memfasilitasi Pengawasan dan Audit
SAP mempermudah proses pengawasan dan audit karena adanya standar yang jelas dan terukur dalam pelaporan keuangan. Hal ini memudahkan auditor dalam menilai kepatuhan dan kinerja pengelolaan keuangan.

5. Mendukung Perencanaan dan Penganggaran

Dengan adanya standar yang jelas, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. SAP membantu dalam penyusunan anggaran yang realistis dan pengelolaan keuangan yang efisien.

Laporan Keuangan Konsolidasian Berdasarkan PSAP No.11

PSAP No.11 memberikan pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang disusun oleh entitas induk dengan menggabungkan laporan keuangan dari seluruh entitas anak di bawah kendalinya, sehingga menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi.

Prinsip utama PSAP No.11 adalah:

1. Seluruh aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja entitas anak harus digabungkan sepenuhnya (full consolidation).
2. Eliminasi saldo dan transaksi antar-entitas dalam satu grup pelaporan untuk menghindari pengakuan ganda.
3. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menjelaskan kebijakan akuntansi, metode konsolidasi, dan informasi tambahan yang relevan.

Laporan Keuangan pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran, kondisi keuangan, dan kinerja selama satu periode anggaran. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi.

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntansi pemerintahan biasanya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya, sebagaimana didalam akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintahan juga terdapat unsur akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. (Mumtaz Muhammad Naufal and Laylan Syafina 2024)

Laporan keuangan pemerintah juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh entitas pelaporan, seperti Sekretariat DPRD Nias Barat sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunannya bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta memenuhi aspek pertanggung jawaban publik.

Fakhrurazi (2010) menyatakan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan dan dapat dibandingkan bagi stakeholders. dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, pemerintahan dapat menyajikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan daerah dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang bergelar good governance. (Tegor et al. 2021). Berdasarkan PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Meliputi Sebagai Berikut:

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari beberapa jenis laporan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Mahsun(2015), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pendapatan dinilai tidak baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus diperoleh. (Gurhanawan 2023)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tahun anggaran. (Zuliyana, Mawaddah, and Hartati 2023)

2. Neraca

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tahun anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tahun anggaran. (Ariesta and Nurhidayah 2020)

3. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – Laporan Operasional (LO), beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Sigarlaki et al. 2023)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas merupakan suatu revisi darimana uang kas yang diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Menurut PSAK No. 2 (IAI 2015:120), Laporan arus kas adalah laporan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar atau setara kas, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. (Daulay and Syafina 2022)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Ekuitas didapat dari selisih jumlah aktiva (asset) setelah dikurangi dengan pasiva (kewajiban). Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang memuat tentang semua perubahan atas ekuitas untuk suatu periode yang termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan pemeriksaan kesalahan yang diakui. (Yulianasari 2020)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan diperlukan sebagai wadah mencatat informasi tambahan atas laporan keuangan. (Yulianasari 2020)
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pelaporan pemerintah daerah, maka disusunlah laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini terdiri atas beberapa komponen utama yang masing-masing menyajikan informasi berbeda namun saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber Data

M.Sobry Sutikno, Prosmala hadi (2020) Saputra Penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Kendati demikian, definisinya dapat disimpulkan lebih komprehensif-integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. (Safrudin et al. 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat.

1. Sumber data:

Data Primer: Diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Sekretariat DPRD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen-dokumen seperti peraturan pemerintah terkait SAP, PSAP No.11, dokumen laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya

2. Jenis Data

Data kualitatif data tentang sifat teks, kata, atau gambar. Jenis data yang dibutuhkan adalah wawancara, observasi dan dokumen.

Metode pengumpulan Data

1. Observasi, Peneliti melakukan observasi langsung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat untuk melihat dan mencatat proses penyusunan laporan keuangan sebelum dan sesudah dilakukan konsolidasi. Observasi ini meliputi pengecekan dokumen laporan, prosedur kerja, serta penggunaan standar akuntansi pemerintahan (PSAP No.11). Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan dan kesesuaian penerapan standar.
2. Wawancara, menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi, Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta laporan konsolidasian Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Data dokumentasi ini berguna sebagai bukti tertulis untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, serta untuk membandingkan kesesuaian laporan dengan PSAP No.11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan PSAP No.11 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah menerapkan ketentuan dalam PSAP No. 11 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Standar ini digunakan untuk menyatukan laporan dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat, agar menjadi satu laporan yang utuh dan menyeluruh.

Proses konsolidasi dimulai dari pengumpulan laporan keuangan dari setiap subbagian atau unit kerja. Selanjutnya, data tersebut direkap dan dianalisis untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi ganda atau data yang belum lengkap. Setelah itu, dilakukan penggabungan laporan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, khususnya yang tercantum dalam PSAP No. 11.

Penerapan standar ini tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang ada di bagian keuangan. Petugas keuangan di Sekretariat DPRD telah dibekali dengan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana laporan harus disusun dan dikompilasi. Selain itu, penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIPD) juga sangat membantu dalam proses konsolidasi laporan. Sistem ini memungkinkan data dari berbagai unit masuk secara terintegrasi, sehingga memudahkan penyusunan laporan akhir yang lebih cepat dan akurat. Walaupun penerapannya secara umum sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah SDM yang benar-benar menguasai teknis pelaporan, serta kendala dalam hal sinkronisasi data antar unit.

Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depannya, agar pelaksanaan PSAP No. 11 dapat berjalan lebih optimal. Dalam penerapan PSAP No. 11, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana menyatukan laporan keuangan dari berbagai unit organisasi menjadi satu laporan keuangan konsolidasian yang lengkap, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap bagian di Sekretariat DPRD, seperti Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, maupun bagian perencanaan, menyusun laporan keuangannya masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu, laporan-laporan tersebut digabungkan oleh tim keuangan menjadi satu laporan konsolidasi yang mewakili keseluruhan entitas Sekretariat.

Proses ini tentu tidak lepas dari berbagai tahapan penting. Pertama, dilakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang sama agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya, belanja barang/jasa dari dua bagian yang dicatat ganda harus diidentifikasi dan dikoreksi. Selanjutnya, dilakukan eliminasi atas transaksi internal antar unit—contohnya jika ada pengadaan barang oleh satu bagian yang juga diterima sebagai aset oleh bagian lain. Selain itu, dalam proses penyusunan ini, pihak Sekretariat juga sangat memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung seperti bukti transaksi, SPJ, laporan pertanggungjawaban kegiatan, serta pencatatan aset tetap. Hal ini penting karena laporan yang dikonsolidasikan harus bisa diverifikasi baik oleh atasan langsung, auditor internal, maupun BPK jika dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil wawancara dengan staf keuangan, diketahui bahwa penerapan PSAP No. 11 cukup membantu dalam menyusun laporan yang rapi dan sistematis. Adanya format dan struktur laporan yang seragam membuat proses pencatatan menjadi lebih mudah dipahami dan diikuti, terutama saat menginput data ke dalam aplikasi pelaporan seperti SIPD. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa penerapan PSAP No. 11 juga menghadirkan beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pelatihan lanjutan bagi staf baru, serta masih adanya perubahan kebijakan teknis dari pusat yang membuat daerah harus beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antar bagian serta peningkatan kapasitas SDM agar pelaporan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya disusun untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik maupun pihak internal. Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PSAP No. 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabel jenis laporan keuangan yang berhasil dikonsolidasikan dalam penelitian ini :

Tabel 1 Jenis Laporan keuangan

No.	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih	✓	
3	Neraca	✓	
4	Laporan Operasional	✓	
5	Laporan Arus Kas	✓	
6	Laporan Perubahan Ekuitas	✓	

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan selama satu periode anggaran. Laporan ini membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

1. Pendapatan: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, serta bantuan keuangan lainnya.
2. Belanja: Belanja Operasi: belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas. Belanja Operasi: belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas. Belanja Tidak Terduga: untuk kebutuhan mendesak atau darurat.
3. Selisih: Selisih antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran apakah pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan rencana atau tidak. Selisih positif menunjukkan anggaran belanja tidak terpakai sepenuhnya, sedangkan selisih negatif menunjukkan belanja melebihi anggaran.

Tabel 2 Laporan Realisasi anggaran

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Belanja Operasi	Rp 20.946.003.052	Rp 20.946.003.052	Rp 0	0,00%
Belanja Modal	Rp 14.862.900	Rp 14.862.900	Rp 0	0,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 20.960.865.952	Rp 20.960.865.952	Rp 0	0,00%
Surplus / (Defisit)	(Rp 20.960.865.952)	(Rp 20.960.865.952)	Rp 0	0,00%
Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Pembiayaan Neto	Rp -	Rp -	Rp -	-
SiLPA	Rp -	Rp -	Rp -	-

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar-benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No.11) seluruh perhitungan konsolidasi dilakukan berdasarkan pedoman resmi, sehingga sesuai aturan yang berlaku.
2. Telah melalui proses eliminasi transaksi antar unit menghindari pengakuan ganda yang bisa menyebabkan laporan tidak wajar.
3. Keseimbangan debit dan kredit terjaga angka konsolidasi menunjukkan neraca tetap balance, menandakan perhitungan akuntansi benar.
4. Sumber data berasal dari laporan resmi Sekretariat DPRD angka yang digunakan valid karena diambil dari dokumen yang telah diverifikasi.
5. Rekonsiliasi dilakukan secara sistematis saldo awal, transaksi, dan saldo akhir sudah dicocokkan kembali sehingga tidak ada selisih.

Pada tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024 menggambarkan perbandingan

realisasi anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat untuk dua tahun anggaran berturut-turut. Tabel ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, jumlah belanja, surplus/defisit, serta pembiayaan. Pada pos belanja operasi, nilai realisasi pada tahun 2023 dan 2024 tercatat sama yaitu sebesar Rp 20.946.003.052. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran operasional dikelola secara konsisten tanpa adanya perubahan nominal, dengan selisih Rp 0 dan persentase perubahan 0,00%. Demikian juga pada belanja modal, tidak terdapat perubahan nilai antara kedua tahun, yaitu sebesar Rp 14.862.900. Untuk belanja tidak terduga, tidak ada alokasi maupun realisasi dana, yang berarti tidak ada kejadian luar biasa atau keadaan darurat yang memerlukan penggunaan anggaran tak terduga pada kedua tahun tersebut.

Secara total, jumlah belanja yang terealisasi pada kedua tahun adalah sama, yaitu Rp 20.960.865.952. Dengan tidak adanya perubahan nominal total belanja, maka dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan anggaran oleh Sekretariat DPRD Nias Barat cukup stabil. Selanjutnya, pada bagian surplus/defisit, karena tidak terdapat pendapatan yang dilaporkan, maka terjadi defisit anggaran pada kedua tahun sebesar Rp 20.960.865.952. Nilai defisit ini juga tidak berubah dari tahun 2023 ke 2024. Selain itu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan maupun direalisasikan, sehingga pembiayaan neto juga bernilai nol. Pos SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga tidak menunjukkan nilai karena tidak terdapat sisa dana atau mungkin belum dihitung.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan antara realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024, baik dari sisi nominal maupun persentase. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan anggaran, namun juga mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pengelolaan pendapatan dan strategi pembiayaan agar defisit anggaran dapat ditekan dan keberlanjutan fiskal dapat terjaga.

Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi awal SAL, penggunaan selama tahun berjalan, serta sisa saldo anggaran yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip-prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 11, yang bertujuan untuk menciptakan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan antarperiode. Dalam konteks pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, saldo anggaran lebih mencerminkan sisa dana yang tersedia dari tahun sebelumnya yang belum digunakan, serta penyesuaian yang mungkin terjadi selama tahun berjalan. Dana ini kemudian dapat digunakan sebagai pembiayaan atas defisit atau kebutuhan belanja tambahan tanpa harus mengandalkan penerimaan baru.

Tabel 3 Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Beban Operasional				
Beban Pegawai	Rp 10.827.252.589,00	Rp 10.753.688.674,00	Rp 73.563.915,00	0,68%
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.119.288.463,00	Rp 11.419.012.791,00	(Rp 1.299.724.328,00)	(11,38%)
Jumlah Beban Operasi	Rp 20.946.541.052,00	Rp 22.172.701.465,00	(Rp 1.226.160.413,00)	(5,53%)
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp 538.485.962,00	Rp 563.215.561,00	(Rp 24.729.599,00)	(4,39%)
Jumlah Beban	Rp 21.485.027.014,00	Rp 22.735.917.026,00	(Rp 1.250.890.012,00)	(5,50%)
Surplus / (Defisit) LO	(Rp 21.485.027.014,00)	(Rp 22.735.917.026,00)	Rp 1.250.890.012,00	5,50%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11 Perhitungan beban operasional, beban penyusutan, serta surplus/defisit LO dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.11, sehingga penyajian data sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Proses Eliminasi Transaksi Antar Unit Seluruh transaksi antar bagian telah dieliminasi, sehingga tidak ada pencatatan ganda yang bisa menimbulkan kesalahan dalam perhitungan total beban maupun surplus/defisit.
3. Keseimbangan Perhitungan Akuntansi Jumlah beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan jika dijumlahkan menghasilkan total beban yang konsisten dengan angka surplus/defisit. Hal ini menunjukkan perhitungan akuntansi benar dan neraca tetap balance.
4. Sumber Data Resmi dan Terverifikasi, Angka-angka dalam tabel bersumber dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD, sehingga data yang ditampilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Rekonsiliasi Data, Selisih antar tahun, baik dalam bentuk nominal rupiah maupun persentase, sudah dicocokkan kembali melalui proses rekonsiliasi. Dengan demikian, data yang disajikan pada tabel ini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pada Tabel 3 tersebut menyajikan informasi mengenai perbandingan antara realisasi beban operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan efisiensi pengelolaan belanja serta perubahan signifikan yang terjadi dari tahun ke tahun. Komponen pertama adalah beban pegawai, yang mengalami kenaikan dari Rp 10.753.688.674,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 10.827.252.589,00 pada tahun 2024, dengan selisih sebesar Rp 73.563.915,00 atau naik sebesar 0,68%. Kenaikan ini mencerminkan kemungkinan adanya penyesuaian gaji atau tunjangan, serta penambahan jumlah pegawai. Sebaliknya, beban barang dan jasa mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp 11.419.012.791,00 di tahun 2023 menjadi Rp 10.119.288.463,00 di tahun 2024, dengan selisih negatif sebesar Rp 1.299.724.328,00 atau turun 11,38%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau pengurangan aktivitas operasional yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa. Jumlah beban operasi secara keseluruhan juga menurun sebesar Rp 1.226.160.413,00 atau 5,53%, yang mencerminkan pengurangan total belanja untuk kegiatan operasional. Penurunan ini sejalan dengan strategi efisiensi anggaran yang mungkin diterapkan oleh sekretariat.

Komponen berikutnya adalah beban penyusutan dan amortisasi, yang juga mengalami penurunan dari Rp 563.215.561,00 menjadi Rp 538.485.962,00, dengan selisih sebesar Rp 24.729.599,00 atau turun 4,39%. Ini menunjukkan bahwa aset tetap yang digunakan dalam operasional mengalami penyusutan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan karena tidak adanya penambahan aset besar atau karena aset lama telah habis masa manfaatnya. Jumlah beban keseluruhan pun menurun dari Rp 22.735.917.026,00 menjadi Rp 21.485.027.014,00 atau berkurang Rp 1.250.890.012,00 (5,50%). Penurunan beban secara keseluruhan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2024. Akhirnya, nilai surplus atau defisit Laporan Operasional (LO) menunjukkan angka negatif pada kedua tahun, namun besarnya lebih kecil di tahun 2024. Defisit menurun dari Rp 22.735.917.026,00 menjadi Rp 21.485.027.014,00, yang berarti ada perbaikan defisit sebesar Rp 1.250.890.012,00 atau sekitar 5,50%. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah melakukan penghematan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran operasionalnya di tahun 2024, terutama dalam komponen barang dan jasa, meskipun beban pegawai mengalami sedikit peningkatan. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap pengendalian anggaran dan efektivitas pelaksanaan program kerja.

Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat pada akhir periode anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Laporan ini mencerminkan jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi (jika ada), serta besarnya ekuitas yang menggambarkan kekayaan bersih entitas. Penyusunan neraca ini mengacu pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dan PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Informasi dalam neraca penting untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah. Berikut disajikan tabel neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 4 Neraca

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
ASET				
Aset Lancar	144.000	682.000	(538.000)	0,00%
Aset Tetap	9.812.123.322	9.812.123.322	0	93,72%
Aset Lainnya	656.744.610	656.744.610	0	6,27%
Jumlah Aset	10.469.549.932	10.469.549.932	0	100,00%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00%
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00%
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00%
EKUITAS				
Ekuitas	10.841.460.118	10.841.460.118	0	103,55%
Surplus/Defisit LO	(22.735.917.026)	(22.735.917.026)	0	-217,12%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11
Penyusunan laporan aset, kewajiban, dan ekuitas ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.11 sehingga struktur penyajian sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Proses Eliminasi Transaksi Antar Unit
Eliminasi telah dilakukan pada transaksi antar bagian agar tidak terjadi pencatatan ganda yang berpengaruh pada nilai aset maupun ekuitas.
3. Keseimbangan Perhitungan Akuntansi
Jumlah aset yang disajikan balance dengan ekuitas setelah memperhitungkan surplus/defisit LO, menunjukkan bahwa perhitungan konsolidasi sudah benar dan sesuai kaidah akuntansi
4. Sumber Data Resmi dan Terverifikasi
Angka-angka dalam tabel bersumber dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD, yang telah diverifikasi sehingga validitas data terjamin.
5. Rekonsiliasi Data
Seluruh saldo aset, kewajiban, dan ekuitas telah direkonsiliasi dengan saldo awal dan akhir tahun, sehingga tidak ada perbedaan atau selisih perhitungan.

Pada tabel 4 di atas merupakan Neraca Konsolidasian Tahun 2023 dan 2024, yang menyajikan informasi posisi keuangan dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada dua tahun berturut-turut, lengkap dengan selisih antar tahun dan persentase komposisi terhadap total aset atau ekuitas.

Pada bagian aset, total kekayaan yang dimiliki oleh entitas mencapai Rp 10.469.549.932 pada tahun 2024, sama seperti tahun sebelumnya. Aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp 9,81 miliar atau sekitar 93,72% dari total aset, menunjukkan dominasi aset jangka panjang yang digunakan untuk operasional pemerintah. Aset lancar hanya mencakup 0,00%, menunjukkan nilai yang sangat kecil (Rp 144.000), dan aset lainnya menyumbang 6,27% yaitu sebesar Rp 656 juta. Tidak ada perubahan nilai aset dari tahun 2023 ke 2024. Pada sisi kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang tercatat nihil (Rp 0), baik di tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tidak memiliki utang yang harus dibayar dalam jangka waktu dekat maupun panjang, yang berarti tidak ada beban kewajiban yang perlu ditanggung di masa depan. Bagian ekuitas mencerminkan sumber dana internal yang digunakan untuk mendanai aset. Tercatat nilai ekuitas sebesar Rp 10,84 miliar dan defisit dari Laporan Operasional (LO) sebesar Rp (22,73 miliar). Meski mengalami defisit, terdapat ekuitas konsolidasian sebesar Rp 22,29 miliar, yang menunjukkan hasil dari konsolidasi antar entitas pelaporan. Akhirnya, jumlah ekuitas kembali ke angka total aset yaitu Rp 10.469.549.932. Komposisi ini menunjukkan bahwa seluruh aset dibiayai dari ekuitas tanpa utang, namun dengan pengaruh signifikan dari surplus atau defisit. Secara keseluruhan, neraca ini seimbang antara jumlah aset dan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, yaitu masing-masing sebesar Rp 10.469.549.932. Tidak ada perubahan nilai dari tahun 2023 ke 2024, dan seluruh selisih tercatat nol. Persentase digunakan untuk menggambarkan proporsi masing-masing akun terhadap total nilai neraca, memperlihatkan struktur keuangan secara proporsional dan stabil dari tahun ke tahun.

Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat selama satu periode anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi beban operasional, penyusutan aset, serta kinerja keuangan entitas secara menyeluruh dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.

Laporan ini menyajikan informasi tentang jenis-jenis beban yang digunakan untuk mendukung operasional sekretariat, termasuk beban pegawai, barang dan jasa, serta penyusutan, yang masing-masing dibandingkan dengan tahun sebelumnya guna memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana publik, serta menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang.

Berikut disajikan tabel Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 5 Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Beban Operasional				
Beban Pegawai	Rp 10.827.252.589,00	Rp 10.753.688.674,00	Rp 73.563.915,00	0,68%
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.119.288.463,00	Rp 11.419.012.791,00	(Rp 1.299.724.328,00)	(11,38%)
Jumlah Beban Operasi	Rp 20.946.541.052,00	Rp 22.172.701.465,00	(Rp 1.226.160.413,00)	(5,53%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 538.485.962,00	Rp 563.215.561,00	(Rp 24.729.599,00)	(4,39%)
Jumlah Beban	Rp 21.485.027.014,00	Rp 22.735.917.026,00	(Rp 1.250.890.012,00)	(5,50%)
Surplus / (Defisit) LO	(Rp 21.485.027.014,00)	(Rp 22.735.917.026,00)	Rp 1.250.890.012,00	5,50%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

- Penerapan PSAP No.11**
Penyajian beban operasional dan surplus/defisit LO mengikuti standar PSAP No.11 sehingga format dan pengakuannya sudah sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan.
- Eliminasi Beban Antar Unit**
Proses eliminasi atas transaksi antar bagian telah dilakukan, sehingga angka beban yang muncul adalah beban konsolidasi yang bersih tanpa duplikasi pencatatan.
- Konsistensi Perbandingan Tahun 2023 dan 2024**
Tabel menyajikan perbandingan dua tahun sehingga jelas terlihat tren. Misalnya, beban pegawai meningkat Rp 73.563.915 (0,68%), sedangkan beban barang dan jasa turun Rp 1.299.724.328 (11,38%).
- Keseimbangan Perhitungan**
Jumlah beban operasi ditambah beban penyusutan menghasilkan total beban yang sama dengan nilai surplus/defisit LO. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan akuntansi konsolidasi telah tepat (balance).
- Sumber Data Resmi**
Angka-angka berasal dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, sehingga validitas dan keabsahannya terjamin.

Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai beban operasional dan beban penyusutan yang dikeluarkan selama satu tahun

anggaran, serta mencerminkan kinerja keuangan dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, total beban pada tahun 2024 sebesar Rp 21.485.027.014,00, mengalami penurunan sebesar Rp 1.250.890.012,00 atau sekitar 5,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 22.735.917.026,00. Penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian yang baik terhadap belanja operasional dan belanja lainnya yang bersifat non-kas seperti penyusutan.

Komponen terbesar dalam laporan ini berasal dari beban operasional, khususnya beban pegawai dan beban barang dan jasa. Beban pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 73.563.915,00 atau sebesar 0,68% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini umumnya disebabkan oleh penyesuaian pada gaji pokok, tunjangan ASN, dan tunjangan anggota DPRD. Di sisi lain, beban barang dan jasa justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 1.299.724.328,00 atau 11,38%, dari Rp 11.419.012.791,00 menjadi Rp 10.119.288.463,00. Penurunan ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari seperti belanja alat tulis kantor, makanan rapat, pemeliharaan aset, serta jasa lainnya.

Selain itu, beban penyusutan dan amortisasi juga mengalami penurunan sebesar Rp 24.729.599,00 atau sekitar 4,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai penyusutan mencerminkan bahwa tidak banyak aset tetap baru yang diakui selama tahun berjalan, serta menunjukkan adanya pengurangan penurunan nilai manfaat dari aset-aset yang sudah dimiliki. Secara umum, Laporan Operasional tahun 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp 21.485.027.014,00, yang jika dibandingkan dengan defisit pada tahun 2023 sebesar Rp 22.735.917.026,00, terdapat perbaikan kinerja keuangan sebesar Rp 1.250.890.012,00. Meskipun tetap berada dalam posisi defisit, namun arah pengelolaan anggaran menuju efisiensi dan efektivitas semakin terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, telah lebih terukur, terkendali, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas yang ada.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan gambaran mengenai aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Laporan ini menyajikan informasi penting mengenai sumber dan penggunaan kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, serta menunjukkan posisi kas akhir periode. Tujuan utama penyusunan laporan arus kas ini adalah untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta untuk mengetahui kecukupan arus kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung aktivitas operasional pemerintahan. Laporan ini juga berguna dalam menilai kinerja keuangan secara menyeluruh, khususnya dalam aspek likuiditas dan solvabilitas, serta sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan kas daerah.

Berikut disajikan tabel Laporan Arus Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 6 Laporan Arus Kas

Kategori Aktivitas	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Aktivitas Operasi	Penerimaan dari Pendapatan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Belanja Operasi	Rp 20.946.003.052	Rp 20.946.003.052	Rp 0	100,00%
	Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Kas Operasi	Rp 20.960.865.952	Rp 20.960.865.952	Rp 0	100,00%
Aktivitas Investasi	Belanja Modal	Rp 14.862.900	Rp 14.862.900	Rp 0	100,00%
Aktivitas Pendanaan	Penerimaan Pembiayaan (SAL)	Rp 524.161.062	Rp 524.161.062	Rp 0	100,00%
	Saldo Awal Kas	Rp 31.361.116.950	Rp 31.361.116.950	Rp 0	100,00%

Sumber: *Olahan Penulis*

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11, penyusunan laporan arus kas ini telah mengikuti pedoman resmi akuntansi pemerintahan, mencakup aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Proses eliminasi transaksi antar unit telah dilakukan. Dengan demikian, angka yang disajikan pada pos Belanja Operasi sebesar Rp 20.946.003.052 dan Belanja Modal Rp 14.862.900 adalah murni tanpa adanya pengakuan ganda.
3. Keseimbangan arus kas terjaga, terlihat dari jumlah pengeluaran kas operasi tahun 2024 dan 2023 yang sama yaitu Rp 20.960.865.952, serta Saldo Awal Kas Rp 31.361.116.950 yang tetap balance. Hal ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi dilakukan dengan benar.
4. Sumber data berasal dari laporan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, sehingga angka-angka yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Rekonsiliasi dilakukan secara sistematis, baik untuk saldo awal, penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir. Hasilnya, tidak ditemukan selisih, dengan seluruh pos menunjukkan realisasi 100%, yang menandakan laporan ini akurat dan sesuai standar.

Tabel di atas menyajikan laporan arus kas tahun 2023 dan 2024 yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada aktivitas operasi, tidak terdapat penerimaan dari pendapatan, sehingga seluruh pengeluaran berasal dari belanja operasi dengan nilai sebesar Rp 20.946.003.052 dan tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga juga tidak terjadi pada kedua tahun tersebut. Jumlah keseluruhan pengeluaran kas operasi mencapai Rp 20.960.865.952, menunjukkan konsistensi penuh tanpa perubahan antar tahun. Untuk aktivitas investasi, terdapat belanja modal sebesar Rp 14.862.900 yang juga tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sementara pada aktivitas pendanaan, terdapat penerimaan pembiayaan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 524.161.062, yang jumlahnya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Saldo awal kas yang digunakan untuk memulai kegiatan kas juga tetap sebesar Rp 31.361.116.950. Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nominal antar tahun 2023 dan 2024 di seluruh pos arus kas, sehingga seluruh selisih adalah nol dan persentase realisasinya mencapai 100% pada semua pos yang memiliki nilai. Hal ini mencerminkan stabilitas anggaran dan realisasi penggunaan dana yang konsisten antar tahun.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun untuk memberikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas yang terjadi selama satu periode pelaporan, sebagai akibat dari surplus atau defisit laporan operasional, koreksi atau penyesuaian terhadap saldo awal, serta transaksi ekuitas lainnya. Laporan ini menggambarkan secara transparan bagaimana posisi kekayaan bersih pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, mengalami kenaikan atau penurunan selama tahun anggaran 2024.

Melalui laporan ini, dapat diketahui seberapa besar dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap ekuitas, serta bagaimana kebijakan anggaran dan realisasi kinerja keuangan memengaruhi posisi keuangan bersih akhir periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga mencerminkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh entitas dan menjadi bagian penting dalam menyajikan gambaran utuh atas laporan keuangan yang terintegrasi. Berikut disajikan tabel Laporan Arus Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 7 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	Persentase Realisasi (%)
Ekuitas Awal	Rp 10.400.249.932	Rp 10.400.249.932	Rp 0	-
Surplus/Defisit LO	(Rp 21.485.027.014)	(Rp 22.735.917.026)	Rp 1.250.890.012	5,50%
Koreksi Ekuitas	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0	-
Ekuitas Konsolidasian	(Rp 20.960.865.952)	(Rp 22.294.706.840)	Rp 1.333.840.888	5,99%
Ekuitas Akhir	Rp 9.876.089.936	Rp 9.876.089.936	Rp 0	-

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Penerapan PSAP No.11

Penyajian ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi ekuitas, ekuitas konsolidasian, dan ekuitas akhir telah mengikuti format PSAP No.11, sehingga struktur penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Eliminasi Transaksi Antar Unit

Proses eliminasi terhadap transaksi antar bagian dalam laporan telah dilakukan. Hal ini membuat nilai ekuitas konsolidasian yang ditampilkan benar-benar bersih tanpa adanya pencatatan ganda.

3. Perbandingan Tahun 2023 dan 2024

Tabel menyajikan perbandingan yang konsisten antar dua tahun. Misalnya, defisit LO berkurang Rp 1.250.890.012 (5,50%), sehingga berdampak pada penurunan defisit ekuitas konsolidasian sebesar Rp 1.333.840.888 (5,99%).

4. Keseimbangan Perhitungan

Ekuitas akhir tetap sama pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 9.876.089.936. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perhitungan konsolidasi sudah tepat dan seimbang (balance).

5. Sumber Data Resmi

Angka-angka yang ditampilkan berasal dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian, data ini valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Tabel laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi penting terkait dinamika perubahan nilai ekuitas selama dua tahun anggaran terakhir, yaitu 2023 dan 2024. Data ini menggambarkan pergerakan posisi keuangan entitas yang berasal dari surplus/defisit operasional serta penyesuaian lain yang mempengaruhi ekuitas. Pada bagian Ekuitas Awal, tercatat sebesar Rp 10.400.249.932 baik untuk tahun 2023 maupun 2024, yang menunjukkan bahwa nilai ekuitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan bersifat konsisten dan berasal dari saldo tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) menunjukkan nilai negatif, yaitu (Rp 22.735.917.026) pada tahun 2023 dan (Rp 21.485.027.014) pada tahun 2024. Meskipun kedua tahun mengalami defisit, namun terdapat perbaikan kinerja operasional sebesar Rp 1.250.890.012 atau setara dengan peningkatan efisiensi sebesar 5,50%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mengurangi jumlah pengeluaran yang melebihi pendapatan, meskipun belum mencapai posisi surplus. Komponen Koreksi Ekuitas menunjukkan Rp 0,00 pada kedua tahun, yang berarti tidak terdapat penyesuaian atau koreksi signifikan terhadap nilai ekuitas, baik karena perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan periode sebelumnya, maupun lainnya.

Perubahan yang paling mencolok terlihat pada bagian Ekuitas Konsolidasian, yang merupakan hasil penggabungan dari ekuitas awal dan surplus/defisit. Terjadi peningkatan nilai ekuitas konsolidasian dari (Rp 22.294.706.840) pada tahun 2023 menjadi (Rp 20.960.865.952) pada tahun 2024, dengan selisih positif sebesar Rp 1.333.840.888 atau meningkat 5,99%. Ini mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Akhirnya, Ekuitas Akhir tetap tercatat sebesar Rp 9.876.089.936 pada kedua tahun. Konsistensi nilai ini dapat mencerminkan bahwa proses akumulasi ekuitas telah distabilkan dan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan signifikan dari pos-pos yang memengaruhinya. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, dengan indikasi perbaikan kinerja operasional yang mulai terlihat pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan standar tersebut telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman yang berlaku. Hal ini tercermin dari tersusunnya seluruh jenis laporan keuangan konsolidasian dengan rincian nominal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencatat total belanja sebesar Rp 20.960.865.952 pada tahun 2024 dan 2023, dengan defisit sebesar Rp 20.960.865.952 tanpa perubahan antar tahun. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan jumlah beban operasional tahun 2024 sebesar Rp 21.485.027.014, turun dari Rp 22.735.917.026 di tahun sebelumnya. Terjadi perbaikan defisit LO sebesar Rp 1.250.890.012 atau sekitar 5,50%. Neraca mencatat total aset sebesar Rp 10.469.549.932, yang berasal dari aset tetap sebesar Rp 9.812.123.322, aset lainnya Rp 656.744.610, dan aset lancar Rp 144.000, tanpa kewajiban, dengan jumlah ekuitas konsolidasian dan

akhir yang sama yaitu Rp 10.469.549.932. Laporan Operasional menunjukkan beban operasional sebesar Rp 21.485.027.014 di tahun 2024, turun dari Rp 22.735.917.026 di tahun 2023. Defisit LO pada tahun 2024 adalah Rp 21.485.027.014, membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Arus Kas mencatat belanja operasi sebesar Rp 20.946.003.052, belanja modal Rp 14.862.900, dan penerimaa pembiayaan (SAL) sebesar Rp 524.161.062, dengan saldo awal kas sebesar Rp 31.361.116.950, baik pada tahun 2023 maupun 2024, tanpa perbedaan nominal. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 10.400.249.932, dengan ekuitas akhir tetap sebesar Rp 9.876.089.936. Perubahan utama berasal dari defisit LO dan tidak terdapat koreksi ekuitas pada dua tahun tersebut. Penerapan PSAP No.11 sangat membantu dalam menyatukan laporan keuangan dari berbagai unit menjadi satu laporan yang utuh dan akurat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan lanjutan, serta kendala teknis dalam proses eliminasi transaksi antar entitas. Namun demikian, dengan dukungan sistem informasi keuangan (SIPD), serta adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan komitmen dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual secara konsolidasi.

Saran

1. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat.
Mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang memadai guna memudahkan proses konsolidasi dan eliminasi data antar unit kerja. Sekretariat DPRD juga perlu menyusun pedoman atau prosedur operasional standar (SOP) yang jelas terkait tahapan penyusunan laporan konsolidasian agar pelaksanaannya lebih sistematis dan terukur. Transparansi pelaporan keuangan dapat diperkuat dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada pihak internal dan eksternal untuk membangun kepercayaan publik serta meningkatkan akuntabilitas lembaga. Implementasi pengawasan internal yang kuat juga sangat penting untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan, serta memastikan bahwa proses penyusunan laporan berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Peneliti selanjutnya .
Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan PSAP No.11 tidak hanya di satu instansi, tetapi juga di beberapa OPD atau daerah lain untuk mendapatkan perbandingan dan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas penerapan standar ini. Penelitian juga sebaiknya mengkaji dampak penerapan PSAP No.11 terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, studi kasus dari unit kerja yang telah berhasil mengimplementasikan PSAP No.11 secara optimal dapat dijadikan contoh praktik terbaik. Peneliti juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor seperti keterbatasan SDM, kendala teknis, dan dukungan teknologi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan standar, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menilai perubahan dan perkembangan penerapan PSAP No.11 dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Salamatul, Annida Aljannatul Arsy, and Engkus. 2021. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang." *Akuntansi Sistem Pemerintahan* 2(4):1113–20.
- Anon. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Edisi Terb. bandung: FokusMedia.
- Ariesta, Cindy, and Fitriyah Nurhidayah. 2020. "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK- ETAP Pada UMKM (Studi Kasus Pada Elden Coffee & Eatery)." *Jurnal Akuntansi* 9(2):194–202.
- Daulay, Amelia Putri, and Laylan Syafina. 2022. "Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan PT. Sumber Satwa Sejahtera." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 1(1):25–30. doi: 10.59086/jam.v1i1.5.
- Dedi Irawan Zebua, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea, Apriman Hura, and Kurniawan Sarototonafo Zai. 2023. "Penerapan Psap 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Nias Utara." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10(2):1277–86. doi: 10.35794/jmbi.v10i2.50425.
- Gurhanawan, Gurhanawan. 2023. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat." *Co-*

- Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis 2(3):125–31. doi: 10.55904/cocreation.v2i3.527.
- Indarti, Wanti, Novia Damayanti, and Lia Uzliawati. 2024. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi PSAK 4 Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasi." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5(4):608–16. doi: 10.47065/ekuitas.v5i4.5116.
- Makalalag, Fitria Ningsi, Jantje J. Tinangon, and Dhullo Afandi. 2023. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11(1):1308–18. doi: 10.35794/emba.v11i1.47157.
- Mumtaz Muhammad Naufal, and Laylan Syafina. 2024. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3(4):266–73. doi: 10.54259/akua.v3i4.3277.
- Risal, Muh Afdal, and Surianto Ilham. n.d. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) No.01 Pada Kantor Camat Tanggetada." (01).
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata. 2023. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan." *Jurnalku* 3(1):23–34. doi: 10.54957/jurnalku.v3i1.366.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3(2):1–15.
- Sigarlaki, Joshua A., Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. 2023. "Evaluasi Penyajian Dan Pelaporan Beban Operasi Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of Presentation and Reporting of Operating Expenses in the Regional Health Office of North Sulawesi Province." 7(3):1–8.
- Sihadi, Imaniar Dwiputri, Dhullo Afandi, and Wulan D. Kindangen. 2025. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Atas Penyajian Persediaan Dalam Laporan Keuangan Pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 13(01):21–30.
- Taufiq Khaerudin, Aileen Okta Azalia, Nabilah Maulita, Endang Kartini Panggiarti. 2023. "Ekonomika+vol+10+no+2+Juni+2023+hal+308-315." *Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan Psak No. 15, Psak No. 22 Dan Psak No. 65* 10 No. 2(E-ISSN:2798-575X, P-ISSN:2354-6581).
- Tegor, Tegor, Juliza, Yusmalina Yusmalina, and Fauzan Haqiqi. 2021. "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun)." *Jurnal Cafetaria* 2(1):13–24. doi: 10.51742/akuntansi.v2i1.276.
- Yulianasari, Nina SH. 2020. "KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM MEMPEROLEH PEMBIAYAAN KREDIT (Studi Kasus Di Sentral Oleh-Oleh Cita Rasa Kota Bengkulu)." *Jurnal Akuntansi Uihaz* 3(1):51–65.
- Zai, Enzelina, Serniati Zebua, Noviza Asni Waruwu, and Dedi Irawan Zebua. 2024. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4(3):1787–99. doi: 10.47709/jebma.v4i3.4771.
- Zuliyana, Siti, Arifah Mawaddah, and Rini Hartati. 2023. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis." *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 3(1):11–33. doi: 10.19105/sfj.v3i1.8539